

MODAL SOSIAL DALAM PENGINTEGRASIAN ETNIS TIONGHOA PADA MASYARAKAT DESA PAKRAMAN DI BALI

I W Mudana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: wayanmudana75@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan tentang modal sosial dalam pengintegrasian etnis Tionghoa pada masyarakat desa pakraman di Bali yang di dalamnya mencakup tentang kemultietnikian masyarakat desa pakraman, pola pemukiman etnis Tionghoa, jaringan hubungan sosial etnis Tionghoa dengan anggota masyarakat desa pakraman, bentuk-bentuk integrasi etnis Tionghoa dengan anggota masyarakat desa pakraman, model kontrol sosial yang dikembangkan guna mempertahankan integrasi antar etnik pada desa pakraman. Kajian terhadap hal itu akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan atas hal itu terungkap bahwa masyarakat desa pakraman di Bali merupakan masyarakat multietnik. Pola pemukiman etnis Tionghoa pada umumnya di pusat aktivitas ekonomi, jalur utama dancendrung berbaur dengan etnis lainnya. Jaringan hubungan sosial yang dikembangkan ada yang didasarkan atas kedekatan tempat tinggal, kekerabatan, kepentingan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Bentuk integrasi sosialnya dalam bentuk perkawinan, hubungan pertetangga/ hubungan tempat tinggal, persekutuan/perkumpulan./organisasi sosial baik yang berbasis sosial maupun budaya. Model kontrol sosial yang dikembangkan berupa penanaman nilai melalui sosialisasi, pemanfaatan sistem sosial keluarga/kuren, desa pakraman, kelembagaan formal lainnya, dan dengan pemanfaatan budaya fisik seperti surat, telpon, radio, pengeras suara. Di samping itu juga menggunakan bahasa. Dengan kata lain kontrol sosial dalam pemeliharaan modal sosial dan integrasi antar etnik dilakukan secara sekala dan niskala.

Kata kunci: modal sosial, integrasi, desa pakraman

Abstract

This study aims to know the social capital in integration of Chinese ethnic at community in Pakraman village, the Chinese ethnic's settlement pattern, the nets of Chinese ethnic's relationship with the member of Pakraman village, the shapes of Chinese ethnic integration with the members of Pakraman village, social control model, that is developed for defending integration of inert ethnics in Pakraman village. The analyze that matter will be carried out, with qualitative approach. According of the matter, it is known that communities of Bali Pakraman village, consist of multiethnic society. The settlements of Chinese ethnics are generally at the centre of economic activity, at the main space and there are inclined by the other ethnic. The nets of social connection that is developed, some of them are; base on nearness settlements, genetic relationship, social interest, economic, culture and politics. The shape of their social integration in marriage shape, neighborhood relation, settlements relation, social group, organization, federation, those have a social base or culture. The model social control, which is developed, there is a value investment through socialization, benefit of system of family/kuren social, Pakraman village, the other of formal institution and by benefit physique culture, such as letter, telephone, radio, loud speaker. In the other side, there is also by using language. By the other word social control in controlling social capital and integrating inter ethnic is carried out by niskala and skala system.

Keywords: social capital, integration, pakraman village.

PENDAHULUAN

Daerah Bali pada dasarnya merupakan suatu daerah yang bersifat terbuka. Keterbukaan Bali terhadap masyarakat lainnya, dapat dibuktikan dengan adanya berbagai peninggalan sejarah, baik dari jaman pra sejarah maupun dari jaman sejarah (Kartodirjo, 1975; Ardika, 1989). Hubungan dengan dunia luar terus dimantapkan, hal ini tampak dari semakin berkembangnya hubungan kebudayaan, perdagangan, dan politik dengan negara-negara lain (Agung, 1989). Kehadiran berbagai kelompok etnis pada masyarakat Bali tidak jarang diwarnai dengan penampakan ciri-ciri kultur etnisnya dan bersifat eksklusif dalam satu perkampungan tertentu, seperti Kampung Cina, Kampung Jawa, Kampung Bugis, Kampung Arab dan lain sebagainya. Hal itu dimaksudkan bukan saja dalam rangka memudahkan untuk mengenalinya, tetapi juga sebagai suatu strategi dalam mempertahankan identitas sosiokultural dan untuk menciptakan keamanan sosial.

Mereka umumnya menetap di daerah pusat-pusat aktivitas ekonomi seperti pasar dan pelabuhan, sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1982) yang menyatakan bahwa sejak beberapa abad lamanya kota-kota pelabuhan kuno di Aceh, di Semenanjung Malaka, di daerah pantai Jawa Utara, dan banyak tempat lain di Indonesia telah mempunyai segolongan pedagang Tionghoa. Di Bali pada abad ke 19 Geertz menyatakan bahwa orang Cina memainkan peranan penting dalam aktivitas perdagangan pada kerajaan-kerajaan yang ada di Bali (2000). Kehadirannya sejak mula pertama sampai pada pendatang berikutnya di kepulauan Nusantara, memang telah menimbulkan berbagai permasalahan (Hendarti, 1975). Hal ini disebabkan oleh adanya sikap beberapa kalangan masyarakat Cina yang enggan melakukan proses integrasi dengan masyarakat setempat. (Burhanuddin, 1988).

Kenyataan tersebut nampaknya sangat berbeda dengan fenomena yang terjadi di Bali, terbukti dengan harmonis dan

terintegrasinya hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat setempat. Kondisi tersebut diperkuat dengan terjadinya perkawinan antar etnis Bali dengan etnis Tionghoa, dan masuknya mereka dalam berbagai kelembagaan sosial keagamaan. Bahkan diantara mereka ada yang sampai menjadi pemangku di Desa Pekraman. Walaupun demikian bukan berarti mereka telah sepenuhnya kehilangan identitas sebagai etnis Tionghoa.

Fenomena tersebut telah menarik berbagai kalangan untuk mengkajinya. Sebagaimana terbukti dari adanya berbagai kajian tentang Etnis Tionghoa di Indonesia, seperti misalnya: Ratna Hindarti meneliti tentang "Perbedaan Orientasi Nilai Budaya Antara Generasi Muda dan Orang Tua Golongan Keturunan Cina" (1975). Koentjaraningrat, mengkaji tentang "Lima Masalah Integrasi Nasional" (1982).. Onghokham membahas tentang "Refleksi Seorang Peranakan Mengenai Sejarah Cina-Jawa" (1983). Jurnal Antropologi Indonesia secara khusus mengangkat tentang keberadaan etnik tionghoa di Indonesia (No.71/2003). Demikian pula Majalah Intisari dalam edisi khususnya juga mengangkat tentang etnik Tionghoa di Indonesia (2006). Kajian tentang etnis Tionghoa di Bali baru dilakukan oleh Nyoman Griya (1995), yang mengkaji tentang Amalgamasi antara Etnis Cina dengan Etnis Bali. Made Pageh (1998) mengkaji tentang "Peranan Syahbandar Cina di Pantai Utara Bali Pertengahan abad XIX dan awal abad XX. Mudana (2000), mengkaji tentang Etnis Tionghoa di Desa Catur – Kintamani – Bali. Kajian-kajian tersebut di atas belum ada secara khusus mengkaji tentang Modal Sosial. Sehubungan dengan hal itu maka kajian ini difokuskan mengkaji tentang Modal Sosial

dalam Pengintegrasian Etnik Tionghoa pada Masyarakat Desa Pakraman di Bali.

Konsep modal sosial pertama kali diperkenalkan oleh L.J. Hanifan pada awal abad ke-20. Hanifan menyatakan bahwa modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan asset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Di dalamnya terkandung kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial (Atmadja, 2006). Selanjutnya konsep tersebut dikembangkan oleh Piere Bourdieu, Robert Putman, James Coleman, dan Francis Fukuyama. Coleman (1988) mendefenisikan sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan-jaringan yang dapat meningkatkan efesiensi dalam masyarakat melalui fasilitas bagi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Elemen pokok modal sosial meliputi: (1) saling percaya, (2) kejujuran, (3) pranata yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma-norma dan sanksi-sanksi. Elemen-elemen tersebut dalam dinamikanya harus dikreasikan dan ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme sosialbudaya di dalam sebuah unit sosial seperti keluarga, komunitas, asosiasi sukarela, negara dan sebagainya. Hal-hal tersebut juga akan terwadahi dalam beberapa modal sosial yang bersifat horizontal, seperti Paguyuban, Asosiasi, Organisasi Lokal, Jaringan Sosial, dan dilandasi dengan norma dan nilai yang mengacu pada solidaritas, toleransi,

kepercayaan, dan kerjasama.(Eko, 2004, lihat pula Fukuyama, 2005; Hasbullah, 2006; Hermawanti, dan Hesti Rinandari, 2003).

Fukuyama menyatakan bahwa modal sosial merupakan seperangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota suatu kelompok yang memungkinkan kerja sama diantara mereka (2005; Hermawanti dan Rinandari, 2003). Konsep-konsep tersebut menunjukkan pengakuan peran penting organisasi-organisasi informal, nilai-nilai budaya, dan keyakinan agama masyarakat setempat. Modal sosial sangat penting untuk mewujudkan integrasi, kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat. Setiap modal sosial akan selalu terkandung adanya dua dimensi yang saling terkait yaitu dimensi kognitif/kultural yang berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas, dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Dimensi kedua adalah dimensi struktural yang berupa susunan ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Kedua dimensi ini dalam masyarakat selalu berdinamika. Dinamika dari kedua dimensi ini akan memungkinkan terjadinya keharmonisan, dan juga dominasi, hegemoni, jaringan kuasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemukiman etnik Tionghoa pada Desa Pakraman di Bali?
2. Bagaimana jaringan hubungan sosial masyarakat etnik Tionghoa pada Desa Pakraman di Bali?
3. Bagaimana bentuk-bentuk integrasi etnik Tionghoa dengan etnik Bali pada Desa Pakraman di Bali?
4. Bagaimana model kontrol sosial yang dikembangkan oleh masyarakat etnik Tionghoa dan etnik Bali pada Desa Pakraman dalam pemertahanan modal social dan integrasi antar etnik desa Pakraman di Bali?

METODE

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi masyarakat desa pakraman, yaitu Desa Pakraman Buleleng, Catur, dan Pempatan. Dalam pengkajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun informan penelitian ini ditentukan secara purposive snowball. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik triangulasi data dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Desa Pakraman di Bali merupakan satu kesatuan sosial religius. Sebagai sebuah *desa pakraman*, desa ini dipimpin oleh *Kelian Desa Pakraman*. Setiap *desa pakraman* memiliki wewidangan/ *pelemahan* dan warga masyarakat/*pawongan*. Keberadaannya sebagai satu kesatuan sosial religius sangat penting artinya bagi masyarakat di Bali, baik dalam kaitannya dengan pengembangan jaringan sosial, pembinaan dan penerahan sumber daya manusia serta dalam aktivitas keagamaan yang terkait dengan pelaksanaan Panca Yadnya.

Dari perspektif sosiokultural masyarakat *desa pakraman* Buleleng, Catur dan Pempatan bersifat multietnik. Kemultietnikannya dapat dilihat dari adanya berbagai etnik yang ada di daerah tersebut, di *desa pakraman* Buleleng tinggal etnis Tionghoa, Arab, Sasak, Madura, Padang, Bugis, Timor, dan lain sebagainya. Di Desa Catur terdapat etnis Tionghoa. Di desa Pempatan pupuan terdapat etnis Tionghoa, dan Madura. Keberadaan kemultietnik dan kemultikultural dari masyarakat desa pakraman di Bali terpresentasikan juga dari adanya perkampungan yang berlatar belakang etnik, seperti Banjar Bali, Banjar Jawa, Kampung Bugis, Kampung Muslim, Kampung Sasak, Kampung Arab. Adanya perkampungan semacam itu dilatar belakangi oleh proses migrasi dan pemertahanan identitas etnik serta pengembangan rasa aman di daerah rantau yang multietnik. Pengembangan dan pemertahanan identitas etnik juga dipresentasikan dengan munculnya berbagai kelompok berlatar belakang etnik, seperti Kelompok Suka Duka Keluarga Besar Masyarakat Sasak, Kelompok Suka Duka Keluarga Besar Masyarakat Bugis, Kelompok Suka Duka Masyarakat Cina, Kelompok Suka Duka Masyarakat Sumba, Kelompok Suka Duka Masyarakat Padang, dsb. Bahkan dikalangan mahasiswa pun hal seperti itu juga berkembang, ini dapat dilihat dari munculnya kelompok mahasiswa yang berlatar belakang kedaerahan, seperti Kelompok Mahasiswa Lombok. Kemulti etnikannya masyarakat juga tampak dari adanya sarana publik seperti pemakaman Cina/Kuburan Cina.

Kemultikultural suatu masyarakat juga dapat dilihat dari adanya berbagai kelompok keagamaan, di *Desa Pakraman* di Bali ada berbagai kelompok keagamaan

seperti: Hindu, Islam, Katolik, Protestan, Budha, dan Kong Hu-Tsu. Keberadaan masing-masing kelompok keagamaan tersebut memiliki tempat ibadah, seperti Pura bagi umat Hindu, Masjid bagi umat Islam, Gereja bagi umat Kristen dan Protestan, Wihara bagi umat Budha. Identitas kemultikultural juga dapat dilihat dari adanya kelembagaan-kelembagaan yang berbasis keagamaan, seperti PHDI bagi umat Hindu, kelompok pengajian bagi umat Islam, Tempat Pembinaan Umat bagi Kristen dan Protestan. Presentasi dari kemultikultural juga dapat disimak dari adanya ruang publik yang berlatar belakang etnik, seperti Kuburan (Kuburan Kristen, Kuburan Cina, Kuburan Muslim, Kuburan Hindu), Pendidikan (PGA, STKIP Agama Hindu, Muhammadiyah, SMU Swastiastu/Kristen, Kursus Bahasa Mandarin, Kursus Bahasa Arab, dll). Presentasi dari kemultietnik/kemultikultural dari masyarakat *Desa Pakraman* di Bali juga dapat dilihat dari adanya pelayanan publik yang berbasis etnik/ikatan primordial seperti Warung Muslim, Budha ha-ha, Bakso Bali, Rumah Makan Padang, Bakso Solo, Warung Sate Madura, Warung Jawa, dll. Kemultikultural juga dapat dilihat dari pakaian yang dipergunakan dan aktivitas-aktivitas sosial yang berbasis ikatan primordial, seperti Bahasa pergaulan, nama panggilan dalam pergaulan, dll. Kondisi kemajemukakan masyarakat *desa pakraman* akan semakin bervariasi bila dilihat secara vertical maupun secara horizontal (Nasikun, 1987). Secara Horizontal masyarakat desa tidak hanya menampakkan adanya variasi etnik, tetapi juga akan menampakkan adanya variasi agama, klan/*wangsa*, orientasi politik, pekerjaan. Sedangkan secara vertikal akan

menampilkan berbagai variasi jenjang kehidupan dalam berbagai dimensinya, baik dari dimensi ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Masing-masing kelompok tersebut tentu saja akan menampilkan pola budaya, identitas, jaringan sosial, dan perilaku sosial yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam konteks *rwa bhinenda* atau oposisi binary, kondisi kemultietnikn/ kemultikulturalan masyarakat *desa pakraman* di Bali di satu pihak dapat menjadi kebanggaan, merupakan modal sosial/budaya, namun di sisi yang lain juga merupakan sumber kerawanan sosial. Sehubungan dengan hal itulah maka diperlukan upaya penggalian sumber-sumber pengintegrasikan masyarakat baik melalui pengungkapan pengakuan akan kebinnekaan maupun keikaan/ pluralisme dan universalisme, dialog antar kelompok etnis.

Keberadaan masyarakat multietnik tentu juga nampak dari adanya masyarakat yang bermukim di *desa pakraman* di Bali. Pola pemukiman masyarakat etnik Tionghoa umumnya berbaur terutama disekitar pusat-pusat aktivitas ekonomi, sebagaimana tampak pada pola pemukiman etnik Tionghoa di *Desa pakraman Buleleng, Catur, dan Pempatan*. Kenyataan itu memungkinkan terjadinya hubungan sosial yang semakin intensif. Hal ini diperkuat dengan berbagai ritual sosial tegur sapa atau saling tolong menolong pada berbagai kegiatan suka duka. Kondisi semacam itu tidak saja dapat memperkuat integrasi tetapi juga dapat mengembangkan modal sosial baik dalam bentuk hubungan pertetanggaaan, suka duka, gotong royong, maupun dalam bentuk jaringan sosial lainnya. Pola pemukiman sebagai arena sosial sebagaimana dikonsepsikan oleh

Pierre Bourdieu (Rindawati, 2010) pada *desa pakraman* dapat menjadi ruang bagi proses dialog atau tindakan komunikatif sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas (Habermas, 2006) dan ruang konstruksi sosial sebagaimana dikonsepsikan oleh Peter L Berger dan Thomas Lukman (Sriningsih, 2010) dalam penguatan modal sosial dan integrasi.

Dalam masyarakat multikultural di Bali dialog antara kelompok etnik pada umumnya mempergunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dialog antar anggota masyarakat tentu saja akan dapat mengurangi terjadinya mis konsepsi dan memudahkan adanya kesatuan pemahaman tentang berbagai permasalahan sosial yang dihadapinya. Namun dalam hal-hal tertentu juga diselingi dengan penggunaan bahasa etnik, seperti Bahasa Bali, Bahasa Jawa, dan Bahasa Cina. bahkan pada *desa pakraman* seperti di Desa Catur dan Pempatan hubungan sosialnya cenderung menggunakan bahasa Bali. Dengan demikian pola pemukiman yang dikembangkan oleh masyarakat Tionghoa pada *desa pakraman* tidak saja berkontribusi pada kehidupan ekonomi tetapi juga kehidupan sosial/ modal sosial.

Jaringan sosial yang dikembangkan dalam kehidupan di wilayah pemukiman pada awalnya berupa jaringan hubungan sosial yang didasarkan atas kedekatan tempat tinggal. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa tetangga merupakan teman yang paling dekat dalam mengatasi masalah suka dan duka. Jaringan hubungan sosial yang juga dikembangkan adalah jaringan hubungan sosial yang di dasarkan atas kekerabatan antar etnik Tionghoa dengan etnik Bali. Jaringan hubungan sosial yang lain adalah yang didasarkan atas identitas etnik, hal ini dapat dilihat dari

adanya perkumpulan suka duka etnis Tionghoa *Ling San Ting*/Bukit Suci. Jaringan sosial antar etnis sangat nampak peranannya dalam kegiatan suka duka, sebagaimana terlihat pada masyarakat Desa Catur. Setiap ada warga desa Catur yang meninggal baik etnis Bali maupun etnis Tionghoa setiap warga wajib menyumbang bahan-bahan upakara dan uang sebesar Rp. 1000, -.

Di samping itu ada juga jaringan sosial yang didasarkan atas kepentingan anggota masyarakat seperti dengan pengembangan perkumpulan olah raga sebagai suatu arena sosial. Arena sosial semacam ini sangat penting artinya dalam pengembangan jaringan hubungan sosial, misalnya di *Klenteng Ling Gwan Kiong* setiap hari sabtu dan minggu diadakan latihan bersama Barong Sai yang diikuti oleh anak-anak anggota masyarakat etnis Tionghoa dan anggota etnis Bali. Hal yang sama juga dapat dilihat pada kegiatan olah raga senam *Taichi*. Latihan ini diikuti oleh anggota masyarakat dari berbagai etnis, termasuk juga etnis Bali dan etnis Tionghoa. Kegiatan latihan dilakukan di Pabean dan di pantai penimbangan di Rangon Sangset (Rumah Makan milik etnis Bali). Pengembangan jaringan sosial juga dilakukan melalui aktivitas keagamaan, seperti dalam setiap piodalan di Pura Segara, Pura Desa, Pura Dalem, dan Pura Jagat Natha, mereka selalu datang melaksanakan persembahyangan dan mengatur dana punia baik berupa uang maupun barang. Pengembangan jaringan sosial juga dilakukan melalui pelayanan sosial kesehatan, seperti yang dilakukan oleh Cik Ha Myo dan Jro Era yang sama-sama menekuni perdukunan/tukang pijat. Mereka mengembangkan hubungan sosial melalui layanan jasa perdukunan/pemijatan.

Kondusifnya masyarakat multikultur di Bali juga dapat dilihat dari adanya kerjasama antar etnik dalam berbagai ruang publik, seperti misalnya di Pasar Anyar I/II, Pasar Buleleng, Pasar Banyuasri, dan Pasar Pupuan. Dalam aktivitas pasar mereka menampakkan hubungan yang harmonis. Hal ini tampak dari adanya kesediaan dari pedagang kelompok etnik tertentu kepada kelompok etnik lainnya memberikan peminjaman tempat, alat, barang, dan bahkan uang, disamping bantuan tenaga. Mantapnya hubungan tersebut juga diperkuat oleh adanya layanan-layanan publik yang terbuka bagi berbagai macam etnik, seperti yang dilakukan oleh dilakukan oleh Cik A Mio, dan Jro Era (Cina/Budhis), atau sebagaimana yang dilakukan oleh almarhum Pak Ketut Wijana (Bali/Hindu). Mereka ini memberikan pelayanan dengan keterbukaan, ketulusan dan penuh kasih. Monumen kemantapan hubungan antar etnik/sub kultur juga dapat dilihat dari adanya keterbukaan kelembagaan umat untuk saling mengakui, saling menyadari, dan saling menerima. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan Pura Taman Sari bagi setiap umat beragama, pura ini terbangun dari sumbangan berbagai umat baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen, Islam dan Kong Hu-Tsu. Keterbukaan semacam ini juga tampak pada Klenteng di Pabean. Tempat ini dijadikan simpul hubungan antar umat beragama, karena tempat suci ini terbuka bagi masyarakat umum untuk berkunjung, menanyakan nasib, keberuntungan, dan kesehatan.

Pada masyarakat *Desa Pakraman* di Bali dikembangkan berbagai kearifan sosial yang dapat menjadi perekat sosial dalam masyarakat multikultur. Dalam tataran teks kognitif terdapat ungkapan kearifan sosial seperti *celebingkah batan biu, gumi*

linggah ajak liu (Bumi ini luas dan ditempati banyak orang), *dos sente don pelendo, ade kene ade keto* (ada yang begini ada yang begitu/penghargaan terhadap variasi sosial). Teks ini mengakui adanya perbedaan karakter dari anggota masyarakat. Hal ini seljalan dengan ungkapan *buka nyuhe aijeng* (seperti kelapa satu tangkai tidak ada yang sama). Adanya perbedaan antar anggota masyarakat juga diakui dalam *awig-awig desa pakraman* dengan memposisikan *krama desa* menjadi *krama negak dan krama tamiu* (anggota masyarakat yang berkedudukan sebagai anggota desa pakraman, dan anggota masyarakat yang berkedudukan sebagai tamu). Teks kognitif yang lain adalah adanya ungkapan *menyama/ bersaudara* seperti: *nyama Madura, nyama Jawa, nyama Sasak, nyama Arab, nyama Cina*, dll. Ungkapan-ungkapan semacam itu juga berkembang pada masyarakat etnik Tionghoa, bahkan ada ungkapan yang menyatakan bahwa etnik Tionghoa merupakan kakak dari etnik Bali. Pernyataan kakak dan adik dalam hubungan antar etnik menyiratkan akan adanya hubungan persaudaraan/ geneologis diantara kedua etnik.

Bentuk integrasi antara etnis Tionghoa dan etnis Bali yang sangat penting artinya adalah perkawinan. Kelembagaan perkawinan tidak saja mengintegrasikan antara dua insan yang saling mencintai/ suami dan istri tetapi juga mengintegrasikan antar kerabat suami dan kerabat istri, seperti yang dialami oleh Dewa Aji Mangku Suwija (55), Sukasna Pandit (40), Pun Bun Siok (58), Tiong Kok Yen (62). Hal seperti itu juga terjadi di desa lainnya di Bali. Hal itu dibenarkan oleh I Nengah Bumbang, seperti misalnya perkawinan Nengah Wirya Kusuma (60) dengan Dina Wati (55), I Gusti Putu Eka (50)

menikah dengan Roosmini (40) mereka merasakan jaringan sosial mereka semakin luas. Bentuk integrasi yang lainnya adalah dalam bentuk ikatan persekutuan/organisasi/ perkumpulan antar etnis misalnya dalam kaitannya dengan aktivitas sosial seperti Suka Duka, perkumpulan Olah Raga *Taichi, Ling Tien Kung, Tenis, Bayu Pertiwi*, dan lain sebagainya. Dalam bidang budaya misalnya sebagai anggota Perkumpulan Barong Sai. Simpul-simpul sosial seperti itu berkontribusi dalam penguatan integrasi sosial lintas etnis pada masyarakat multikultur. Penguatan integrasi antar etnis Bali dengan etnis Tionghoa juga dikontribusi oleh adanya mitos hubungan geneologis dan kultural. Hal itu misalnya dapat disimak dari cerita hubungan antara etnis Bali dengan etnis Tionghoa bagaikan hubungan dua saudara sekandung, kakak ber adik.

Dalam rangka mempertahankan integrasi antar etnik Tionghoa dan etnik Bali, masyarakat mengembangkan suatu sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial pada dasarnya menghubungkan penyimpangan dengan lemahnya ikatan terhadap lembaga-lembaga dasar masyarakat, keluarga, agama, sekolah dan peradilan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa masyarakat Bali mengembangkan sistem pengendalian sosial yang bersifat *sekala* dan *niskala*. Proses pengendalian sosial dalam masyarakat Bali bisa berasal dari bawah dan dari atas (Keesing, 1992; Scott, 1993).

Sarana pengendalian sosial yang diterapkan oleh suatu organisasi, menurut Etzioni (1985) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori analitik, yaitu: fisik, material, atau simbolik. Untuk memantapkan proses pengendalian sosial mereka juga mengembangkan berbagai aturan normatif

sebagaimana tertuang dalam setiap *Awig-Awig Desa Pakraman* di Bali. Kratz (1974: 74) menyatakan bahwa pengendalian sosial pada dasarnya merupakan suatu cara dengan mana suatu kelompok, golongan atau lapisan masyarakat tertentu melaksanakan keseimbangan atau merubah struktur nilai-nilai politik, kebudayaan, agama dan adat sopan santun. Sehubungan dengan hal itu maka bagi masyarakat Hindu Bali yang membimbing dan mengarahkan prilakunya adalah nilai-nilai yang tertuang dalam ajaran Agama Hindu, seperti: *Tat Twam Asi*, *Tri Kaya Parisudha*, *Karma Pala*, *Yajna*, *Guru Bhakti*, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu dijadikan dasar dalam proses pengendalian sosial pada masyarakat *desa Pakraman* di Bali, dalam menjaga modal sosial dan integrasi antar etnik. *Tat Twam Asi* merupakan pencerminan cinta kasih universal antara sesama. Cita kasih merupakan landasan utama bagi berkembangnya toleransi, rasa persaudaraan dan kerukunan hidup antar sesama manusia. Hal itu juga diperkuat oleh berbagai nilai tata susila Hindu, seperti *tresna asih*, *anresangsia*, *catur paramita*, *tri kaya pariudha*, dan *yadnya*. Nilai-nilai tersebut tentu akan dapat mengendalikan perilaku sosial dari anggota masyarakat Bali, lebih-lebih dengan adanya keyakinan terhadap hukum *karma phala*. Sehingga tidak terjadi perlakuan-perlakuan yang kurang terpuji terhadap orang lain. Pengendalian sikap dan perilaku yang kurang terpuji dan pengembangan sikap *welas asih* dan *tresna bhakti* akan dapat menjadi kekuatan bagi kerukunan antar sesama umat manusia. Hal itu lebih lanjut menjadi penguat dalam dinamika sistem sosial masyarakat Bali.

Sistem sosial terkecil dalam masyarakat *desa pakraman* di Bali adalah

kuren/keluarga inti. *Kuren* memainkan peranan yang penting dalam proses pengendalian sosial. Di dalam *kuren* inilah mulai dikonstruksikan nilai-nilai *adiluhung* oleh setiap anggota keluarga. Sistem sosial yang lebih besar dari keluarga adalah *dadia*. *Dadia* pada masyarakat Bali pada dasarnya merupakan kumpulan beberapa *kuren*/keluarga inti dari garis keturunan *kepurusa*/garis keturunan dari pihak laki-laki. Masyarakat Bali di samping terikat dalam kesatuan keluarga dan *dadia* juga terikat dalam kesatuan tempat tinggal bersama, kesatuan administrasi dan *seka* (Geertz, 1979). Acuan dalam berperilaku berupa gagasan, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam sistem budaya masyarakat Bali misalnya dalam susastra Hindu, *awig-awig desa pakraman*, ungkapan-ungkapan dan hukum formal lainnya. Dinamika sistem nilai budaya Bali mengacu pada konsepsi *Desa, Kala, Patra dan Dharma, Artha, Kama*.

Dalam dinamika sistem pengendalian sosial, masyarakat Bali menggunakan berbagai teknologi, baik teknologi tradisional maupun teknologi modern (Foucault, 1997). Pandangan semacam ini sejalan dengan perspektif materialis, yang memandang bahwa teknologi memberikan sumbangan yang besar bukan saja dalam proses produksi, tetapi juga dalam proses perubahan sosial budaya dan sekaligus kontrol sosial. Hal seperti ini juga dilakukan pada *desa pakraman* di Bali misalnya melalui penggunaan pengeras suara, *kulkul*/kentongan, dll. Di samping itu dalam masyarakat Bali juga menggunakan bahasa dalam proses pengendalian sosial. Hal ini dapat disimak dari adanya kebiasaan menggunakan sindiran, ungkapan-ungkapan (*sesenggakan*, *wangsalan*, *bladbadan*) seperti *Yen Ngae Baju Sikutang di Deweke*

(kalau buat pakaian ukur pada diri sendiri, artinya kalau melakukan perbuatan tertentu kembalikan pada diri sendiri), gunjingan dan tidak bicara dalam masa waktu tertentu/*puik*, dalam proses pengendalian sosial. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan masyarakat *desa pakraman* di Bali dalam proses pengendalian sosial untuk mempertahankan modal sosial dan integrasi antar etnik menggunakan pendekatan *sekala* dan *niskala*.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Desa Pakraman* di Bali merupakan masyarakat multietnis, kemultietnikan tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai kelompok etnik yang bermukim di wilayah tersebut, seperti etnis Bali, Etnis Tionghoa, Etnis Jawa, Etnis Madura, dll.
2. Pola pemukiman etnis Tionghoa pada umumnya berbaur dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.
3. Jaringan hubungan sosial yang dikembangkan ada yang didasarkan atas kedekatan tempat tinggal, kekerabatan, kepentingan sosial, ekonomi, budaya dan politik.
4. Bentuk integrasi sosialnya dalam bentuk perkawinan, hubungan pertetangga, hubungan tempat tinggal, persekutuan/perkumpulan/organisasi sosial baik yang berbasis sosial dan budaya.
5. Model kontrol sosial yang dikembangkan berupa penanaman nilai melalui sosialisasi, pemanfaatan sistem sosial keluarga/*kuren*, *dadia*, *desa pakraman*, kelembagaan formal lainnya, dan dengan pemanfaatan budaya fisik seperti *Kulkul*/kentongan, pengeras suara, dll. Di samping itu juga dengan menggunakan bahasa. Dengan kata lain kontrol sosial dalam pemeliharaan modal sosial dan integrasi antar etnik dilakukan secara *sekala* dan *niskala*.

SARAN-SARAN

1. Kondisi kemultietnikan masyarakat memerlukan kebijaksanaan pemerintah secara optimal dalam pemeliharaan kondisi yang kondusif sehingga menjadi kekuatan positif dalam berbagai dinamika kehidupan masyarakat.
2. Pola pemukiman yang berbaur sangat rentan bagi terjadinya konflik. Untuk itu upaya pengembangan keterbukaan/ dialog yang berkeadilan dan berkesinambungan perlu terus diupayakan.
3. Kesadaran dan partisipasi masyarakat multietnik dalam mengembangkan jaringan sosial perlu terus dikembangkan melalui kebijakan pemerintah dan sosialisasi pada masyarakat.
4. Berbagai bentuk integrasi antar etnik Bali dengan etnik Tionghoa perlu terus dikembangkan baik melalui kebijakan pemerintah, maupun melalui penelitian dan pengabdian masyarakat dari kelembagaan perguruan tinggi
5. Berbagai model kontrol sosial dalam mempertahankan modal sosial dan integrasi antar etnik Bali dengan etnik tionghoa dapat dijadikan sebagai suatu inspirasi dalam mengatasi permasalahan yang berkembang pada masyarakat multietnik.

6. Tentu saja harus diikuti adanya berbagai keterbatasan dalam kajian ini sehingga diperlukan adanya upaya yang maksimal untuk melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam tentang masyarakat multietnik, penguatan modal sosial untuk mengatasi berbagai kerapuhan masyarakat bangsa yang multietnik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, Ide Anak Agung Gde, 1989. *Bali Pada Abad XIX*, Yogyakarta: UGM Pres.
- Ardika, I Wayan, 1989. "Bali dalam Sentuhan Budaya Global Pada Awal Abad masehi" dalam *Dinamika Kebudayaan Bali*.
- I Wayan Ardika dan I Made Sutaba (ed). Denpasar: Upanisad.
- Atmadja, Nengah Bawa, 1997. Pendidikan Manusia Antarbudaya, *Bali Post 11 April 1997*.
-2006, *Bali Pada Era Globalisasi*, Singaraja: IKIP N Singaraja
- Badaruddin, 2005, Modal Sosial (*Sosial Capital*) dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan, dalam *Isu-isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhanuddin, 1988. "Ace dan Baba, dalam *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, Jakarta: Grafika Kita.
- Eko, Sutoro, 2004, Modal Sosial, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal, dalam *Jurnal Analisis CSIS, Vol.33, No.3, Sept 2004*, Jakarta: CSIS
- Foucault, Michel, 1997, *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Moder*, Yogyakarta: LKiS.
- Geertz, C, 2000. *Negara Teater*. Yogyakarta: Bentang
- Griya, Nyoman, 1995. Amalgamasi Etnik Tionghoa di Singaraja, *Skripsi (S1)*. FKIP-UNUD: Denpasar.
- Hardiman, Francisco, 1990. *Kritik Ideologi Pertautan pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius
- Hasbullah, Jousairi, 2006, *Sosial Capital, Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, Jakarta: MR-United Press.
- Hendarti, Paulina Ratna, 1975. *Perbedaan Orientasi Nilai Budaya Antara Generasi Muda dan Orang Tua Golongan Keturunan Cina*. Jakarta: Leknas.
- Hermawanti dan Hesti Rinandari, 2002, *Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Ada*, dalam Copyright @ 2003 Institute For Research and Empowerment.
- Kartodirdjo, Sartono, 1975. *Sejarah nasional*, Jakarta: Depdikbud.
- Koentjaraningrat, 1982, *Masalah-Masalah pembangunan Bunga Rapai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Kratz, Ulrich, 1974. Bahasa, Komunikasi, dan Kontrol Sosial, dalam *Prisma 6/1974*. Jakarta: LP3ES.
- Mudana, I Wayan, .2000. *Integrasi Etnik Tionghoa Pada Masyarakat Desa Adat di bali Kasus Catur-Kintamani-Bali*. Singaraja: STKIP.
- Onghokham, 1983. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan
-1991. Minoritas Cina dan Globalisasi., dalam *Tempo No.26/8/1991*.
- Pageh, Made, 1998. Peranan Syahbandar Cina di pantai Utara Bali Pertengahan Abad XIX dan Awal Abad XX, *Makalah S2 Sejarah*. Yogyakarta: UGM Press.